KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BLGCEQXK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

#							
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 4 2 6			H.4 X	H.4 X Final	
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5	H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 0 9 6 9 1 2 4 6 4 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : AGUSTINUS DALIDJO							
3. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2	21-402-01	3.995.300	3.995.300	0	5	199.765	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 124							
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 3 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				ITIMUR			
C.3 ID Subunit C	Organisasi :		\Box			7	
C.4 Tanggal	:	2 3 dd 0 2 mm	2 0 2 2 уууу			_	
C.5 Nama Penan	datangan :	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan \	.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	ı berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	ι mengatur bahwa ι	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	